

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende telah disahkan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang diadakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende.
2. Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende kurang maksimal dikarenakan anggaran yang di anggarkan oleh tiap-tiap program dan kegiatan telah di refocusing untuk penanganan bencana non alam (Covid-19) sehingga ada beberapa program yang belum berjalan dengan baik.
3. Penatausahaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende sudah melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende.
4. Pelaporan Pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende telah mempertanggungjawabkan anggaran yang di refocusing dalam penanganan bencana non alam (Covid-19) yang menyebabkan anggaran

tidak terealisasi dengan baik pada program dan kegiatan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende.

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende sudah melakukan tahapan-tahapan dan mekanisme sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sangat antusias terhadap Pengawasan-pengawasan yang ditetapkan.

6.2 Saran

Saran yang diajukan merupakan jalan keluar yang diberikan oleh peneliti untuk mengatasi sejumlah kesulitan atau permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dalam Pengelolaan Anggaran yakni :

1. Untuk mengatasi inefisiensi dan inefektivitas dalam proses perencanaan sebagai akibat mekanisme birokrasi dalam pengelolaan anggaran di lingkup Pemerintah Daerah yang cukup panjang dan rumit dengan ini direkomendasikan kepada pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende untuk melaksanakan rapat teknis perencanaan sebelum adanya rapat paripurna DPRD dalam penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Untuk mengatasi pelaksanaan pengelolaan anggaran yang terkendala anggaran yang di refocusing sepatutnya Badan Penanggulangan bencana daerah mengajukan permintaan bantuan anggaran ke BNPB Indonesia

sehingga Program dan kegiatan yang sudah direncanakan dapat diselenggarakan.

3. Pemahaman Prinsip partisipatif, transparan dan akuntabilitas harus dilakukan secara berkala kepada pemerintah daerah dan masyarakat guna meningkatkan pengawasan dari internal Pemerintah dan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Basir A.M.(2018). Strategi Penanggulangan Resiko Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton: *Jurnal Ilmu Komunikasi*. 1.(1). Hal 1-8
- Damayanti, E.Y.(2017). Kinerja Pengelolaan Keuangan Dalam Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Di BPBD Kabupaten Trenggalek(*Studi tentang Transparansi, Akuntabilitas dan Value for Money*) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Ismail, A. (2022). Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Pasca Bencana Banjir di Kabupaten Pati (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Lontaan, I. C., & Pangerapan, S. (2016). Analisis Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2012-2014. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1).
- Meitri, I. A. (2022). Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Nur, A. M. (2022). Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Soppeng Analysis of the Role of Local Governments in Natural Disaster Management in Soppeng Kabupaten District (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Naelmunar, N. (2020). Penganggaran Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Tenggara Studi Anggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara (*Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta*).
- Puspita, N. Y., Sembiring, F., & Putra, A. R. H. (2022). Mitigasi Banjir Pada Saat Pandemi Covid 19 Susah siapkah pemerintah DKI Jakarta?. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 129-146.
- Sutrisno, A., & Diana, L. (2022). Analisis Alokasi Belanja Daerah Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wakatobi. *Journal Economics Technology And Entrepreneur*, 1(01 Maret), 173-187.
- Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18(2).

Syarifa H, Roli. T.D, Ali M, Rahmat K.H. Widana Karta Ketut D.T. (2022) Kepabilitas Badan Penanggulangan Daerah Kota Balikpapan Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 7(2). Hal 398-407

Umar, A., Hasan, J., & Tanimbar, S. (2021). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(4), 476-483.